



**BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP Kinerja COVID-19 pada
Pemerintah Kabupaten Serang dan LHP Kinerja Pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang**

Serang, 24 Desember 2021 - BPK Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Serang dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Penyerahan LHP dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Novie Irawati H.P., SE., M.Ak., CFE., CSFA kepada Ketua DPRD Kabupten Serang, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang, Bupati Serang dan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang mewakili Bupati Pandeglang di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (24/12).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilaksanakan oleh BPK, meliputi tiga jenis pemeriksaan, yaitu: Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dalam Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Banten telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan kepatuhan.

Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan antara lain atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemeriksaan Kinerja atas Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 pada Pemerintah Kabupaten Serang.

Kedua tema pemeriksaan kinerja tersebut merupakan pemeriksaan tematik nasional yang selain dilaksanakan secara sampling pada kabupaten di Provinsi Banten juga dilaksanakan secara sampling pada kabupaten/kota diseluruh Provinsi di Indonesia. Hasil pemeriksaan pada dua tema pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Kabupaten Serang dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 dengan sasaran pemeriksaan atas Upaya Pemda dalam Pengalokasian dan pendistribusian vaksin, logistic dan sarana prasarana vaksinasi covid-19 serta upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi covid-19 telah menunjukkan beberapa capaian positif antara lain:
 - a. Pemerintah Kabupaten Serang telah mengalokasikan dan mendistribusikan sarana dan prasarana vaksinasi COVID-19 kepada jenjang layanan vaksinasi di bawahnya; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten Serang telah memiliki strategi/perencanaan pelayanan vaksinasi COVID-19.

Namun demikian, tanpa mengurangi apresiasi terhadap capaian positif tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

- a. belum menyusun perencanaan alokasi vaksin Covid-19 dan logistik dengan menggunakan variable yang valid.;
- b. Pendataan sasaran belum sepenuhnya sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan; dan

Informasi Lebih Lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

(0245) 250025

humastu.banten@bpk.go.id



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

- c. Pemerintah Kabupaten Serang belum sepenuhnya mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi melalui aplikasi PCare dengan data yang lengkap dan benar.

Jika permasalahan tersebut tidak segera dilakukan perbaikan akan mempengaruhi efektivitas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

2. Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 S.D. Semester I 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan upaya-upaya dalam pengelolaan PAD yang berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah, antara lain:
 - a. Pemkab. Pandeglang telah menetapkan perda, perbup, dan POS terkait pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta telah menetapkan pengelolaan Pajak Daerah sebagai salah satu program prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pemkab. Pandeglang telah menyusun kajian potensi Pajak Restoran dan Retribusi Pelayanan Pasar serta melakukan inovasi pembayaran Pajak Daerah.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum menetapkan perencanaan pengelolaan **Retribusi Daerah** dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) pada Disperindag ESDM dan DLH.
- b. belum memaksimalkan pengelolaan Pajak Restoran dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Apabila permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka akan mempengaruhi efektivitas pengelolaan PAD pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam upayanya untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.

BPK telah menyampaikan rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam LHP dan berharap kepala daerah dapat mengintruksikan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang ada sebagai upaya perbaikan. Sesuai dengan kesepakatan dalam rencana aksi.

“Saya berharap Pimpinan dan Anggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya,” ungkap Novie Irawati H.P.

BPK Perwakilan Provinsi Banten

Informasi Lebih Lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

(0245) 250025

humastu.banten@bpk.go.id